



DPA

(Dokumen Pelaksanaan Anggaran)

Tahun Anggaran **2025**



INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR



Benteng, 8 Januari 2025



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH**

Jalan Jend. Ahmad Yani Nomor 1 Benteng 92812 Sulawesi Selatan
Telepon (0414) 22333, Faximile (0414) 21463

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR

NOMOR 900/49/I/2025/BPKPD

TENTANG

**PENGESAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN ANGGARAN 2025**

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

Menimbang : a. bahwa dengan telah dilaksanakannya verifikasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, maka diperlukan adanya pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 140 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kepulauan Selayar di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 326, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7077);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);

25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 807);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 Nomor 119, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 53);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 Nomor 136);
28. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 38 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025 Nomor 824).
29. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 60 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar - Tahun 2024 Nomor 847);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut :

1. Pendapatan	: Rp0,00
2. Belanja Operasi	: Rp12,758,490,200.00
3. Belanja Modal	: Rp412,839,800.00
4. Total Belanja	: Rp13,171,330,000.00
5. Pembiayaan	: Rp0,00

- KEDUA : Segala Biaya yang timbul sehubungan ditetapkan
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun
Anggaran 2025.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan
ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat
kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Benteng
pada tanggal 8 Januari 2025

a.n. **BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,**
Plt. KEPALA BADAN,

NURSAL IKHSAN,S.E.,M.Ak.,M.Si
Pangkat : Pembina Tk.I,IV/b
NIP. 19830525 200604 1 016

P A R A F	
TANGGAL :	
SEKDA	
KABAN	
SEKRETARIS	
KABID	
KASUBAG/KASUBID	



KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

PERSETUJUAN REKAPITULASI
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(DPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2025

Berdasarkan hasil verifikasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah atas seluruh dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah:

- a. Nama : IRWAN BASO, S.STP.
- b. NIP 198004221999121003
- c. Jabatan : INSPEKTUR DAERAH

menyetujui untuk dilakukan pengesahan atas dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah Pemerintah Kab. Kepulauan Selayar sebagai dasar pelaksanaan anggaran daerah Tahun Anggaran 2025

Kode	Nama Formulir
DPA-SKPD	Ringkasan DPA SKPD
DPA-PENDAPATAN SKPD	Rincian Anggaran Pendapatan SKPD
DPA-BELANJA SKPD	Rincian Anggaran Belanja SKPD
DPA-PEMBIAYAAN SKPD	Rincian Anggaran Pembiayaan Daerah SKPD

Demikian disampaikan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Disetujui oleh,
Sekretaris Daerah

Drs. MESDIYONO, M.Ec.Dev
NIP: 197406261993111002

Benteng, Tanggal 08 Januari 2025
Disahkan oleh,
PPKD

NURSAL IKHSAN, S.E., M.Ak., M.Si.
NIP: 198305252006041016



KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(DPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2025

URUSAN PEMERINTAHAN : 6 - UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG URUSAN : 6.01 - INSPEKTORAT DAERAH
ORGANISASI : 6.01.0.00.0.00.01.0000 - INSPEKTORAT DAERAH

a. Nama : IRWAN BASO, S.STP.
b. NIP 198004221999121003
c. Jabatan : INSPEKTUR DAERAH

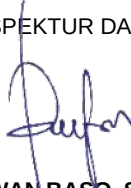
Kode	Nama Formulir
DPA-PENDAPATAN SKPD	Rincian Anggaran Pendapatan SKPD
DPA-BELANJA SKPD	Rincian Anggaran Belanja SKPD
DPA-BELANJA SKPD	Rincian Anggaran Pembiayaan Daerah SKPD

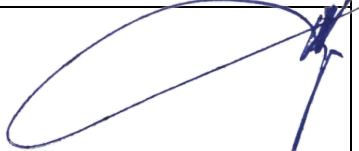
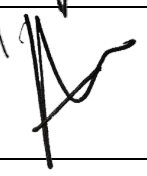
Disahkan oleh,
PPKD

NURSAL IKHSAN, S.E., M.Ak., M.Si.
NIP: 198305252006041016

Benteng, Tanggal 08 Januari 2025
Pengguna Anggaran

IRWAN BASO, S.STP.
NIP: 198004221999121003

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN					DPA-SKPD
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH					
PEMERINTAH KAB. KEPULAUAN SELAYAR					
TAHUN ANGGARAN 2025					
Nomor : DPA/A.1/6.01.0.00.0.00.01.0000/001/2025					
Organisasi: 6.01.0.00.0.00.01.0000 - INSPEKTORAT DAERAH					
Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah					
Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Kode Rekening			Uraian	Jumlah (Rp)	
			Jumlah Pendapatan	Rp0,00	
5	1		BELANJA OPERASI	Rp12.758.490.200,00	
5	1	01	Belanja Pegawai	Rp5.057.330.000,00	
5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	Rp7.701.160.200,00	
5	2		BELANJA MODAL	Rp412.839.800,00	
5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp412.839.800,00	
			Jumlah Belanja	Rp13.171.330.000,00	
			Total Surplus/(Defisit)	(Rp13.171.330.000,00)	
			Jumlah Penerimaan Pembiayaan	Rp0,00	
			Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	Rp0,00	
			Pembiayaan Neto	Rp0,00	
Rencana Realisasi Penerimaan per Bulan*) (Rp)			Rencana Realisasi Rencana Penarikan Dana per Bulan*) (Rp)		
Januari			Rp0,00	Januari	Rp13.170.932.900,00
Februari			Rp0,00	Februari	Rp397.100,00
Maret			Rp0,00	Maret	Rp0,00
April			Rp0,00	April	Rp0,00
Mei			Rp0,00	Mei	Rp0,00
Juni			Rp0,00	Juni	Rp0,00
Juli			Rp0,00	Juli	Rp0,00
Agustus			Rp0,00	Agustus	Rp0,00
September			Rp0,00	September	Rp0,00
Oktober			Rp0,00	Oktober	Rp0,00
November			Rp0,00	November	Rp0,00
Desember			Rp0,00	Desember	Rp0,00
Jumlah			Rp0,00	Jumlah	Rp13.171.330.000,
Benteng, Tanggal 08 Januari 2025					
INSPEKTUR DAERAH					
					
IRWAN BASO, S.STP.					
NIP. 198004221999121003					
Mengesahkan,					
PPKD					
					
NURSAL IKHSAN, S.E., M.Ak., M.Si.					
NIP. 198305252006041016					

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Ir. H. M.Y. KRG. TOMPOBULU, S.T., M.T. IPM.	19680521 199803 1 009	KOORDINATOR	
2	DEMMAK BOJA, S.Sos.	19720409 199402 1 004	ANGGOTA	
3	Hj. MIMI JULIANTI, S.H., M.H.	19720428 200312 2 005	ANGGOTA	
4	ABDUL WAHIDIN, S.E., M.M.	19760808 200604 1 024	ANGGOTA	
5	NUR WAHIDAH, S.Pd.	19680328 200604 2 014	ANGGOTA	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH								FORMULIR DPA-BELANJA SKPD						
KAB. KEPULAUAN SELAYAR TAHUN ANGGARAN 2025														
Nomor DPA : DPA/A.1/6.01.0.00.0.00.01.0000/001/2025														
SKPD : 6.01.0.00.0.00.01.0000 - INSPEKTORAT DAERAH														
Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan														
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T- 1	Tahun					T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
6.01.0.00.0.00.01.0000 - INSPEKTORAT DAERAH									Rp12.758.490.200,00	Rp412.839.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp13.171.330.000,00	
6					UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN				Rp12.758.490.200,00	Rp412.839.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp13.171.330.000,00	
6	01				INSPEKTORAT DAERAH				Rp12.758.490.200,00	Rp412.839.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp13.171.330.000,00	
6	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				Rp7.849.433.759,00	Rp412.839.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.262.273.559,00	
6	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				Rp30.200.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp30.200.000,00	
6	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Semua Kelurahan/Desa		Rp6.200.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.200.000,00	
6	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Semua Kelurahan/Desa		Rp3.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.500.000,00	
6	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Semua Kelurahan/Desa		Rp3.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.500.000,00	
6	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Semua Kelurahan/Desa		Rp3.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.500.000,00	
6	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD		Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Semua Kelurahan/Desa		Rp3.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.500.000,00	
6	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Semua Kelurahan/Desa		Rp5.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.000.000,00	
6	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Semua Kelurahan/Desa		Rp5.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.000.000,00	
6	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				Rp5.061.330.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.061.330.000,00	

Uraian	Bidang Uraian	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	Tahun					T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
6	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp5.057.330.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.057.330.000,00	
6	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Semua Kelurahan/Desa		Rp4.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.000.000,00	
6	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				Rp1.104.798.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.104.798.000,00	
6	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Semua Kelurahan/Desa		Rp50.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp50.000.000,00	
6	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Semua Kelurahan/Desa		Rp964.310.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp964.310.000,00	
6	01	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Semua Kelurahan/Desa		Rp90.488.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp90.488.000,00	
6	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				Rp0,00	Rp412.839.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp412.839.800,00	
6	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Semua Kelurahan/Desa		Rp0,00	Rp113.991.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp113.991.000,00	
6	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel		Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Semua Kelurahan/Desa		Rp0,00	Rp122.887.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp122.887.000,00	
6	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Semua Kelurahan/Desa		Rp0,00	Rp175.961.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp175.961.800,00	
6	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp881.449.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp881.449.500,00	
6	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Semua Kelurahan/Desa		Rp145.297.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp145.297.000,00	
6	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Semua Kelurahan/Desa		Rp736.152.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp736.152.500,00	
6	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp771.656.259,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp771.656.259,00	
6	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Semua Kelurahan/Desa		Rp266.630.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp266.630.000,00	
6	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Semua Kelurahan/Desa		Rp37.550.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp37.550.000,00	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T- 1	Tahun					T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
6	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Semua Kelurahan/Desa		Rp467.476.259,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp467.476.259,00	
6	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN				Rp4.084.144.341,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.084.144.341,00	
6	01	02	2.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal				Rp3.304.448.941,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.304.448.941,00	
6	01	02	2.01	0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah		Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp660.843.441,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp660.843.441,00	
6	01	02	2.01	0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah		Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp852.947.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp852.947.000,00	
6	01	02	2.01	0003	Reviu Laporan Kinerja		Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Semua Kelurahan/Desa		Rp187.569.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp187.569.000,00	
6	01	02	2.01	0004	Reviu Laporan Keuangan		Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Semua Kelurahan/Desa		Rp37.113.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp37.113.000,00	
6	01	02	2.01	0005	Pengawasan Desa		Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp1.255.976.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.255.976.500,00	
6	01	02	2.01	0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP		Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Semua Kelurahan/Desa		Rp310.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp310.000.000,00	
6	01	02	2.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu				Rp779.695.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp779.695.400,00	
6	01	02	2.02	0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah		Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp285.150.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp285.150.000,00	
6	01	02	2.02	0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu		Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp494.545.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp494.545.400,00	
6	01	03			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI				Rp824.912.100,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp824.912.100,00	
6	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan				Rp94.820.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp94.820.000,00	
6	01	03	2.01	0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan		Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Semua Kelurahan/Desa		Rp94.820.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp94.820.000,00	
6	01	03	2.02		Pendampingan dan Asistensi				Rp730.092.100,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp730.092.100,00	
6	01	03	2.02	0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah		Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp259.491.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp259.491.400,00	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T- 1	Tahun					T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
6	01	03	2.02	0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi		Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp37.428.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp37.428.000,00	
6	01	03	2.02	0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi		Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp293.740.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp293.740.700,00	
6	01	03	2.02	0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas		Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp139.432.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp139.432.000,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp13.170.932.900,00
Februari	Rp397.100,00
Maret	Rp0,00
April	Rp0,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	Rp13.171.330.000,00

Benteng, Tanggal 08 Januari 2025

INSPEKTUR DAERAH



IRWAN BASO, S.STP.

NIP. 198004221999121003

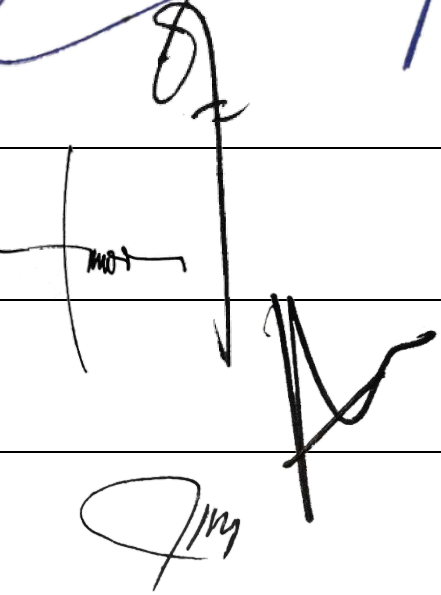
Mengesahkan,

PPKD



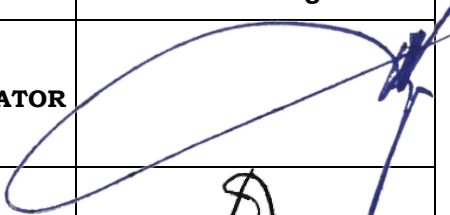
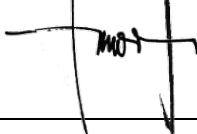
NURSAL IKHSAN, S.E., M.Ak., M.Si.

NIP. 198305252006041016

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Ir. H. M.Y. KRG. TOMPOBULU, S.T., M.T. IPM.	19680521 199803 1 009	KOORDINATOR	
2	DEMMAK BOJA, S.Sos.	19720409 199402 1 004	ANGGOTA	
3	Hj. MIMI JULIANTI, S.H., M.H.	19720428 200312 2 005	ANGGOTA	
4	ABDUL WAHIDIN, S.E., M.M.	19760808 200604 1 024	ANGGOTA	
5	NUR WAHIDAH, S.Pd.	19680328 200604 2 014	ANGGOTA	

*) Sesuai periodisasi SPD

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				FORMULIR DPA - PEMBIAYAAN SKPD	
KAB. KEPULAUAN SELAYAR TAHUN ANGGARAN 2025					
Nomor : DPA/A.1/6.01.0.00.0.00.01.0000/001/2025 Organisasi: 6.01.0.00.0.00.01.0000 - INSPEKTUR DAERAH					
Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Kode Rekening		Uraian			Jumlah
					(Rp)
		Jumlah Penerimaan Pembiayaan			Rp0,00
		Jumlah Pengeluaran Pembiayaan			Rp0,00
Rencana Realisasi Penerimaan Pembiayaan per Bulan*) (Rp)		Rencana Realisasi Pengeluaran Pembiayaan per Bulan*) (Rp)		Benteng, Tanggal 08 Januari 2025 INSPEKTUR DAERAH  IRWAN BASO, S.STP. NIP. 198004221999121003 Mengesahkan, PPKD  NURSAL IKHSAN, S.E., M.Ak., M.Si. NIP. 198305252006041016	
Januari	Rp0,00	Januari	Rp0,00		
Februari	Rp0,00	Februari	Rp0,00		
Maret	Rp0,00	Maret	Rp0,00		
April	Rp0,00	April	Rp0,00		
Mei	Rp0,00	Mei	Rp0,00		
Juni	Rp0,00	Juni	Rp0,00		
Juli	Rp0,00	Juli	Rp0,00		
Agustus	Rp0,00	Agustus	Rp0,00		
September	Rp0,00	September	Rp0,00		
Oktober	Rp0,00	Oktober	Rp0,00		
November	Rp0,00	November	Rp0,00		
Desember	Rp0,00	Desember	Rp0,00		
Jumlah	Rp0,00	Jumlah	Rp0,00		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Ir. H. M.Y. KRG. TOMPOBULU, S.T., M.T. IPM.	19680521 199803 1 009	KOORDINATOR	
2	DEMMAK BOJA, S.Sos.	19720409 199402 1 004	ANGGOTA	
3	Hj. MIMI JULIANTI, S.H., M.H.	19720428 200312 2 005	ANGGOTA	
4	ABDUL WAHIDIN, S.E., M.M.	19760808 200604 1 024	ANGGOTA	
5	NUR WAHIDAH, S.Pd.	19680328 200604 2 014	ANGGOTA	

*) Sesuai periodisasi SPD